

# **ANALISIS LAPORAN SEMESTER APBN TA 2016**

No. 10/an.PKA/Lapsem/VII/2019



**REALISASI SEMESTER  
DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2019  
ANGGARAN KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN**

**PUSAT KAJIAN ANGGARAN  
BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pembangunan bidang kesehatan merupakan salah satu program prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015-2019. Hal tersebut didukung dengan pengalokasian anggaran bidang kesehatan sebesar 5 persen dari APBN yang sejalan dengan Pasal 171 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, alokasi anggaran kesehatan dalam 6 tahun terakhir terus meningkat yang di distribusikan melalui belanja pemerintah pusat (BPP), transfer kedaerah dan dana desa (TKDD) dan pembiayaan. Pada tahun 2019, alokasi anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebesar Rp 58,75 triliun atau mencapai 48 persen dari total anggaran kesehatan nasional yang sebesar Rp123,1 triliun. Besarnya alokasi di Kemenkes disebabkan oleh tupoksi utama Kemenkes dalam fungsi kesehatan dan program penguatan pelaksanaan jaminan kesehatan (JKN).

Per 3 Juli 2019, realisasi anggaran Kemenkes semester I tahun 2019 mencapai Rp36,01 triliun atau 61,29 persen dari pagu dalam APBN tahun 2019. Penyerapan anggaran tersebut lebih tinggi 4,63 persen dibandingkan dengan penyerapan pada periode yang sama di tahun 2018 yang sebesar 56,66 persen. Rata-rata penyerapan tertinggi berada di unit Sekretariat Jenderal (Setjen), yaitu sebesar 63,96 persen yang disebabkan oleh adanya pembayaran dimuka untuk program JKN. Sedangkan, rata-rata penyerapan terendah berada di unit Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Falmalkes) sebesar 14,34 persen yang disebabkan oleh terlambatnya pengadaan obat dan vaksin (kuartal 3 dan 4).

Ada beberapa permasalahan dalam proses penyerapan belanja Kemenkes, antara lain; kurangnya kemampuan penyerapan belanja barang dan modal, kurangnya monitoring dan evaluasi pemanfaatan anggaran, belum optimalnya perencanaan anggaran pembagian kewenangan kantor pusat dan daerah serta kurangnya cakupan sasaran kegiatan dekonsentrasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka ada beberapa rekomendasi agar capaian penyerapan anggaran Kemenkes lebih optimal yaitu: proses pengadaan barang dan jasa lebih dipercepat, monitoring dan evaluasi pemanfaatan anggaran untuk peningkatan kualitas belanja, perencanaan yang matang pada kantor pusat dan daerah, perluasan cakupan sasaran anggaran dekonsentrasi seperti orientasi dan pelatihan agar pemanfaatan anggaran lebih optimal.



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN  
BADAN KEAHLIAN DPR RI**

JL. JEND. GATOT SUBROTO - JAKARTA PUSAT  
TELP. (021) 5715635 - FAX (021) 5715635  
[HTTP://www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id)  
EMAIL: [puskaji.anggaran@dpr.go.id](mailto:puskaji.anggaran@dpr.go.id)